

BAB IV

Rivalitas AS – RRC dalam Dimensi Ekonomi dan Implikasinya di Asia Tenggara

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan bagaimana bentuk rivalitas AS dan China di Asia Tenggara dalam dimensi ekonomi, yakni melalui suatu bentuk kerjasama perjanjian ekonomi regional TPP dan RCEP yang masing – masing kubu kuatkan agar dapat melancarkan tujuan – tujuan mereka, di antaranya yakni tujuan ekonomi demi memenuhi kepentingan ekonomi nasionalnya dan tujuan politik yakni persaingan sebagai negara *superpower*. Namun, gambaran tentang TPP maupun RCEP akan dibahas terlebih dahulu sebelum menjelaskan persaingan AS dan China ini. Selanjutnya, penulis akan menganalisis bagaimana kedua perjanjian yang masih dinegosiasikan tersebut dapat disinyalir sebagai upaya rivalitas di antara keduanya berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan, juga didukung berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Setelah itu, analisis implikasi dari sisi sasaran rivalitas yakni Asia Tenggara akan dipaparkan sebagai bagian penutup bab ini.

A. Kerjasama Regional sebagai Sarana Rivalitas Ekonomi AS dan RRC

1. *Trans-Pacific Partnership (TPP)* sebagai Strategi AS di Asia Tenggara

Dalam memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara, Amerika Serikat memperkuat suatu kerjasama ekonomi regional atau RTA yang dikenal dengan

Trans-Pacific Partnership (TPP). TPP yakni perjanjian perdagangan bebas regional di kawasan Asia-Pasifik termasuk di dalamnya Asia Tenggara yang diberlakukan pada tahun 2009. Pada awalnya perjanjian ini dikenal dengan nama *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (TPSEP)* yang dibentuk pada 18 Juli 2005. TPSEP disahkan oleh negara – negara kawasan Pasifik antara lain Brunei Darussalam, Selandia Baru, Chili, dan Singapura dengan tujuan untuk mempererat kerjasama antar anggota maupun hubungan diplomatik melalui sarana liberalisasi dan investasi untuk menciptakan suatu kemitraan strategis.¹

Gambar 4.1. 12 negara yang tergabung dalam TPP.²



¹ Wen Jin Yuan. (2012). “The Trans-Pacific Partnership and China Corresponding Strategies”. A Freeman Briefing Report

² Trish McAlaster. “The ABCs of TPP”. The Globe and Mail. Diakses melalui <http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/what-is-tpp-understanding-the-new-pacific-tradedeal/article26648948/> pada tanggal 10 April 2017

TPSEP telah melakukan perluasan keanggotaan, yang ditandai dengan bergabungnya Amerika Serikat, Australia, Peru, Vietnam, Malaysia, Meksiko, Kanada, dan Jepang yang menyatakan diri untuk bergabung yang kemudian mengubah TPSEP menjadi TPP dengan total 12 anggota.³ Kini, jenis integrasi yang dilakukan melalui TPP merupakan sebuah integrasi ekonomi regional yang luas dan melibatkan tiga kawasan yaitu Asia, Pasifik dan Amerika Latin.

Keikutsertaan Amerika Serikat dalam TPP direalisasikan secara resmi pada tahun 2008. Bergabungnya AS ini dikarenakan ia tengah berada dalam keadaan krisis ekonomi pada tahun 2008, hal ini bermula pada tahun 2007 dikarenakan keadaan ekonomi yang rusak akibat krisis finansial. Oleh karenanya, Amerika Serikat merasa perlu untuk bergabung dengan kerjasama ekonomi demi memulihkan kembali perekonomian negara, dan di saat itu terdapat TPP yang merupakan kerjasama ekonomi yang mempunyai konsentrasi utama dalam hal liberalisasi perdagangan di kawasan Asia-Pasifik. Dengan kata lain, TPP menjadi suatu wadah bagi Amerika Serikat agar mampu melebarkan perdagangan internasionalnya dan agar problema perekonomian yang dialaminya bisa teratasi.⁴

Upaya yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap kawasan ini adalah sebagai bentuk prioritas politik luar negerinya yang sejalan dengan kebijakan masa pemerintahan Presiden Obama, dimana ia menyatakan dukungan yang kuat untuk menciptakan blok perdagangan baru di kawasan Asia-Pasifik yang juga didukung

³ Wen Jin Yuan. Loc.Cit.

⁴ Zhao Hong. (2014). "China's Evolving Views on the TPP and the RCEP". ISEAS Perspective. p. 3-4

oleh kebijakan AS saat itu dengan kebijakan “*Pivot to Asia*”. Strategi yang dikenal juga dengan *rebalancing* yang dikeluarkan oleh Obama ini adalah usaha AS untuk mengembangkan kerjasama ekonominya di Asia-Pasifik khususnya Asia Tenggara yang selanjutnya dilaksanakan melalui perjanjian kemitraan *Trans-Pacific Partnership (TPP)*.⁵

Amerika Serikat turut gencar mempromosikan TPP baik dalam berbagai pertemuan antar negara terutama ketika AS berkesempatan menjadi tuan rumah pada pertemuan *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)* tahun 2011. Pada pertemuan itu, AS mencoba mengajak anggota APEC untuk ikut serta dalam kerjasama TPP. AS yang saat itu mempunyai wewenang untuk menentukan topik prioritas forum APEC 2011, mengarahkan TPP menjadi topik *highlight* pada saat itu. Alhasil melalui pertemuan itu, Jepang, Kanada, dan Meksiko kemudian menyatakan untuk bergabung dengan TPP.⁶

TPP merupakan suatu kerjasama yang memiliki standar tinggi karena adanya penghapusan biaya pajak 0% untuk perdagangan barang, jasa, dan yang berbeda dengan perjanjian lain yakni mencakup sektor pertanian, serta membangun peraturan yang membahas berbagai masalah, baik itu hak kekayaan intelektual (haki), investasi asing (FDI), dan isu – isu terkait perdagangan lainnya. TPP memuat 30 bab perjanjian yang 14 bab di antaranya yang telah dirundingkan yakni

⁵ The White House – Office of the Press Secretary. (Nov 17, 2011). “Remarks by President Obama to the Australian Parliament”. Diakses melalui <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament> pada tanggal 1 April 2017

⁶ Information about APEC 2007. (2007). “The Importance of APEC”. Diakses melalui <http://www.apec2007.org> pada tanggal 10 April 2017

berkaitan dengan *Sanitary dan Phytosanitary (SPS)*, perdagangan jasa, bea cukai, pengadaan pemerintah, telekomunikasi, dan pembangunan usaha kecil maupun menengah, serta dalam pendefinisian bab yang dibahas serta aturan kelembagaannya.⁷

Perkembangan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik khususnya Asia Tenggara telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan dalam kaitannya dengan *Regional Trade Agreements (RTAs)*, kawasan ini merupakan kawasan yang tinggi dalam pelaksanaannya. Tercatat hingga tahun 2010, kurang lebih terdapat 111 RTA yang telah dibentuk, diperkirakan jumlahnya pun akan terus bertambah sejalan dengan semakin kuatnya dorongan negara – negara di kawasan untuk semakin mengintegrasikan ekonominya.⁸ *Trans-Pacific Partnership (TPP)* termasuk di antaranya.

Berdasarkan tujuannya, TPP terbagi menjadi tiga cakupan utama. *Pertama*, melanjutkan liberalisasi perdagangan dan investasi yang telah dilaksanakan melalui WTO dan inisiatif perjanjian perdagangan bebas yang telah dilaksanakan oleh para negara anggota.⁹ *Kedua*, membangun suatu peraturan yang transparan dan disiplin dengan cara yang memadai dalam hal penyelesaian sengketa, yaitu melalui konsultasi awal, pertemuan komite gabungan yang mewakili pejabat perdagangan

⁷ “Malaysia Involvement on The Trans Pacific Partnership”. Briefing Notes. hal. 2. Diakses dari http://www.miti.gov.my/storage/documents/c94/com.tms.cms.document.Document_62357eeac0a8156f-2c11008e-9a1ecbed/1/TPP%20-%20Briefing%20Notes.pdf pada tanggal 10 April 2017

⁸ Angga Handian Putra. (2011). Edisi IV. “Peluang, Tantangan dan Implikasi Trans Pacific Partnership”. Buletin Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. hal. 17

⁹ Joshua P. Meltzer. (2014) “The Trans-Pacific Partnership Agreement, the Environment and Climate Change”. Trade Liberalisation and International Co-operation: A Legal Analysis of the Trans Pacific Partnership Agreement. p. 6

tingkat kabinet masing – masing negara dan pembentukan panel penyelesaian sengketa.¹⁰ *Ketiga*, membangun lingkungan kerjasama yang kondusif dan transparan serta membuka kesempatan bagi pihak lain untuk bergabung melalui cara dan informasi yang memadai bagi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.¹¹ Singkatnya, secara garis besar tujuan TPP adalah mempererat hubungan dan kerjasama di antara anggota dengan menciptakan sebuah kawasan perdagangan bebas guna memperlancar jalur perdagangan di kawasan yang terintegrasi dengan baik.

TPP merupakan perjanjian dagang bebas yang menjadi percontohan pada abad ke-21 dimana kerjasama ini membahas isu – isu baru, yang mengandung elemen – elemen berbeda dan mampu merespon tantangan dalam perdagangan yang ada di abad ke-21.¹² TPP telah melaksanakan negosiasi sebanyak sembilan kali putaran dan telah melaksanakan pertemuan sejak Maret 2010, namun belum sepenuhnya terealisasi.¹³ Adapun beberapa fitur hasil dari berbagai perundingan TPP tersebut, yakni:

1. Akses pasar yang komprehensif, dengan menghilangkan tarif dan hambatan yang berkaitan dengan sektor perdagangan maupun investasi, sehingga nantinya mampu untuk menciptakan peluang serta manfaat bagi para pekerja, bisnis, dan konsumen.

¹⁰ *Ibid*, p. 7

¹¹ *Ibid*

¹² Normaliza Abdul Manaf. (August 2014) “The Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA): Impact on health in Malaysia”. *International Journal of Innovation and Applied Studies*. Vol. 7 No. 3. p. 1156

¹³ “TPP Negotiation Updates”. United States Trade Representative. Diakses melalui <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-negotiation-updates> pada tanggal 10 April 2017

2. Perjanjian bersifat regional, yang mampu untuk memfasilitasi pengembangan produksi maupun *supply*, juga menyediakan lapangan pekerjaan baru, serta dapat meningkatkan standar hidup negara – negara yang terlibat, baik itu peningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan berkelanjutan di tingkat regional.
3. Membahas isu – isu perdagangan lintas sektor, yakni mewujudkan berbagai hal yang telah dibangun oleh APEC maupun forum kerjasama ekonomi lainnya, seperti halnya regulasi, daya saing dan fasilitasi bisnis, usaha kecil maupun menengah, serta pengembangan di dalamnya.
4. Tantangan baru dalam perdagangan, yaitu mempromosikan perdagangan maupun investasi produk dan layanan yang inovatif berkaitan dengan ekonomi digital dan teknologi lingkungan, juga memastikan lingkungan bisnis yang kompetitif.
5. Melaksanakan kesepakatan untuk mengaktifkan dan memperbarui perjanjian yang sesuai demi mengatasi masalah perdagangan yang muncul di masa mendatang, serta isu – isu baru yang muncul dengan perluasan perjanjian untuk memasukan negara – negara baru yang bergabung.¹⁴

Menurut pandangan Amerika Serikat, ia melihat peluang TPP bukan hanya sekedar membentuk hubungan antar anggota TPP. AS melihat wilayah Asia Tenggara di dalamnya merupakan pasar yang besar dan berpotensi, untuk itu penting untuk membentuk negara – negara di wilayah ini sebagai mitra utama AS. Ditambah dengan pernyataan dari Presiden Obama bahwa AS akan meningkatkan

¹⁴ *Ibid*

keterlibatannya di kawasan dengan bergabung sebagai anggota TPP.¹⁵ Amerika Serikat selanjutnya mengusulkan kepentingan nasionalnya agar dimasukkan dalam kerangka TPP. Poin – poin yang diusulkan tersebut berkaitan dengan sektor – sektor yang menyumbang besar dalam perekonomian AS, yakni akses pasar, investasi, jasa keuangan, *intellectual property*, dan lingkungan. TPP memberikan kesempatan besar untuk AS melakukan upaya tersebut, karena saat ini TPP masih berada dalam proses negosiasi.

TPP merupakan kesepakatan besar terhadap berbagai sektor baik secara ekonomi maupun politik. Pada saat TPP-9 saja, kerjasama ini mengumpulkan GDP gabungan sebesar US\$ 17 triliun, dan perdagangan barang dan jasa mencakup impor ditambah ekspor sebesar US\$ 7 triliun, totalnya didominasi oleh Amerika Serikat dimana negara ini menyumbang lebih dari 85% GDP agregat dan lebih dari 60% total perdagangan negara – negara anggota TPP. Dengan bertambahnya anggota TPP yakni Malaysia, Kanada, Meksiko, dan Jepang akan memperluas GDP US\$ 28 triliun atau senilai 40% dari GDP dunia serta dapat menambah tingkat perdagangan barang dan jasa menjadi US\$ 12,6 triliun, atau sekitar 28% dari total dunia. Dengan demikian, nilai TPP memiliki dorongan lebih bagi perdagangan dan investasi.¹⁶

¹⁵ Bernard K. Gordon. “Obama’s Visit to Indonesia and Australia and the TPP”. East Asia Forum. Diakses melalui <http://www.eastasiaforum.org/2010/05/30/obamas-visit-toindonesia-and-australia-and-the-tpp/> pada tanggal 10 April 2017

¹⁶ “Trade Conference 2013: Para Ahli Bicara Tentang Perdagangan Bebas dan Terbuka”. Diakses melalui <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/02/01/trade-conference-2013-para-ahli-bicara-tentang-perdagangan-bebas-dan-terbuka-id0-1359689781.pdf> pada tanggal 10 April 2017

Ditinjau dari segi manfaat, secara ekonomi TPP akan menyatukan negara – negara di dalamnya yang selanjutnya merepresentasikan sebesar satu pertiga dari perdagangan dunia dan sebesar 40% dari total GDP dunia. Secara strategis, TPP menjadi kesempatan besar bagi AS untuk mempererat kerjasama dengan mitra dagang di dalamnya. Kesempatan ini akan menjadi sebuah peran untuk memimpin dalam membuat peraturan perdagangan seiring dengan perubahan kondisi kawasan yang sedang kritis.¹⁷ Secara garis besar, salah satunya manfaat yang diberikan oleh TPP yaitu menghilangkan hambatan non tarif dalam perdagangan dan investasi antar negara. Hal ini juga berpotensi untuk menjadi sebuah pola yang akan menjadi acuan bagi perjanjian perdagangan di masa yang akan datang.¹⁸ Manfaat TPP lainnya yakni kerjasama ini dapat menghasilkan perjanjian yang dapat menjadi acuan bagi perjanjian perdagangan bebas yang lebih luas melebihi dari 12 negara yang sudah bergabung hingga saat ini. Namun, TPP mengandung isu – isu kontroversial yang menjadi perdebatan.¹⁹ Di antaranya yakni:

1. *Akses Pasar*, TPP mengatur agar negara – negara anggota memangkaskan tarifnya hingga 0% secara bertahap untuk 11.000 komoditas. Pemangkasan tarif untuk masing – masing negara berbeda tergantung kesepakatan mereka secara bilateral satu sama lain. Jika perjanjian dagang bebas lain umumnya memungkinkan negara anggota untuk melindungi komoditas sensitif seperti produk pertanian, TPP meniadakan kemungkinan tersebut. Implikasinya, semua produk tanpa kecuali harus dibebaskan.

¹⁷ Ian F. Fergusson. (2014). “The Trans-Pacific Partnership (TPP) Negotiations and Issues for Congress”. Congressional Research Service. p. 5

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Angga Handian Putra. Op.Cit., hal. 23

2. *Investasi*, TPP mengatur agar negara membentuk *Investor-State Dispute Settlement (ISDS)* guna menempatkan negara dan investor dalam satu posisi yang setara di mata hukum perdagangan internasional. Akibatnya, jika investor merasa pemerintahan suatu negara TPP menerbitkan aturan yang merugikan investor, negara secara otomatis dapat digugat.
3. *Government Procurement*, atau pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang merupakan sektor industri yang amat besar. WTO memperkirakan secara rata – rata sektor itu mencakup 15 – 20% dari GDP tiap negara. Pada umumnya, sektor itu tertutup untuk asing guna melindungi industri dalam negeri. Namun TPP menghendaki agar sektor itu dibuka untuk asing.
4. *Intellectual Property Rights (IPRs)*, TPP menghendaki pengaturan yang lebih ketat untuk IPRs, seperti *copyright* dan paten. Misalnya, *copyright* 50 tahun menjadi 70 tahun terhitung semenjak kematian penulis, sehingga mempersulit akses publik terhadap konten bersangkutan. Paten untuk obat dapat diperpanjang jadi lebih dari 20 tahun sehingga menyulitkan akses obat – obatan murah.
5. *State-Owned Enterprises*, TPP melarang negara memberikan keistimewaan kepada *state-owned enterprises (SOEs)* atau badan usaha milik negara (BUMN) yang artinya tidak ada perlakuan spesial baik melalui mekanisme subsidi harga maupun dukungan kebijakan. BUMN akhirnya diprivatisasi dan meninggalkan program pelayanan publik karena dianggap menjadi faktor lemahnya persaingan.

6. *Regulatory Convergence*, konsekuensi dari bergabung dengan TPP adalah negara yang baru saja ingin bergabung seperti Thailand atau Indonesia nantinya harus mengubah seluruh peraturan perundang-undangnya yang bertentangan dengan aturan – aturan TPP.²⁰

Ketentuan – ketentuan ini berlaku timbal balik terhadap sesama anggota saja dan tidak berlaku terhadap negara non-anggotanya. Para negara – negara anggota juga harus mengikuti jadwal liberalisasi dengan ketentuan yang tidak bisa diubah (*irreversible*) dan bersifat mengikat (*legally binding*).²¹ Unsur – unsur inilah yang membuat TPP masih dalam proses negosiasi karena dinilai agak sulit untuk mampu dilaksanakan oleh negara – negara anggota termasuk khususnya negara – negara berkembang yang tergabung didalamnya. Meski begitu, minat dari para anggota masih terbilang tinggi dan sedang melakukan proses penyesuaian.

Jika TPP dapat sepenuhnya terlaksana, maka hal ini akan menarik minat dari negara lain yang tidak bergabung yang merugi ke dalam perjanjian. Negara yang merugi tersebut akan tertekan, jika tekanan tersebut meluas melebihi satu negara maka akan memperluas juga jangkauan dari TPP, yang pada akhirnya negara – negara tertekan ini akan ikut bergabung ke dalam TPP. Keanggotaan TPP saat ini tidak melibatkan negara besar dalam hal ekonomi seperti Republik Rakyat China yang merupakan rival bagi AS di kawasan Asia Tenggara ini. Namun

²⁰ Shohib Masykur. “Trans-Pacific Partnership dan Artinya bagi Indonesia”. Diakses melalui <http://news.detik.com/kolom/3075190/trans-pacific-partnership-dan-artinya-bagi-indonesia> pada tanggal 10 April 2017

²¹ “Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership guna Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan ASEAN dalam rangka Ketahanan Regional”. (November 2013). Jurnal Kajian Lemhanas RI. Edisi 16. hal. 65

keanggotaannya terbuka asalkan negara yang hendak bergabung harus mengikuti peraturan yang ditetapkan.

Kurangnya pengaruh AS di kawasan Asia Tenggara mendorong AS agar bergabung dengan TPP sebagai upaya pendekatan hubungan dengan Asia Tenggara. Selanjutnya, setelah AS melakukan kerjasama ekonomi seluruh negara Asia Tenggara, maka akan membuka jalan bagi Amerika Serikat untuk mendominasi seluruh wilayah Asia lainnya. Dampak dari perjanjian TPP kepada China sebagai rival bagi AS sangat tergantung pada apakah kerjasama TPP dapat berhasil dinegosiasikan dan diimplementasikan di masa mendatang. TPP akan memiliki beberapa dampak positif bagi perekonomian AS, jika mampu berhasil untuk dilaksanakan.²²

2. *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* sebagai Strategi RRC di Asia Tenggara

Republik Rakyat China semakin gencar mendorong pembentukan kerjasama dengan negara – negara tetangga di wilayah Asia-Pasifik terutama Asia Tenggara, hal ini dilakukan demi meningkatkan perekonomian negaranya juga untuk menguatkan pengaruhnya di kawasan dengan memperluas aliansi, hal yang dilancarkan China di antaranya yakni bergabung dengan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*.²³ RCEP merupakan perjanjian kerjasama regional

²² *Ibid*

²³ “China Plans to Counter-Balance The Influence of TPP?”. International Financial Times. China. Diakses melalui <http://www.ibtimes.com.cn/articles/8777/20120117/china-tpp.htm> pada tanggal 11 April 2017

atau RTA yang dicetuskan oleh ASEAN.²⁴ Tujuan utama dari RCEP yakni menciptakan suatu sinergi baru dari sepuluh negara anggota ASEAN yang digabung dengan kerjasama mitra ASEAN yang sudah melakukan hubungan ekonomi dengan ASEAN. RCEP diekspektasikan mampu memperluas anggota partisipasi serta meminimalkan biaya transaksi untuk bisnis dan segala bentuk inefisiensi yang diciptakan oleh perjanjian perdagangan ASEAN sebelumnya. RCEP kini beranggotakan 16 negara, di antaranya sepuluh anggota ASEAN bersama Australia, Selandia Baru, India, RRC, Korea Selatan, dan Jepang. Negara – negara anggota RCEP secara geografis ditunjukkan pada Gambar 4.2.²⁵

Gambar 4.2. Negara – negara anggota RCEP.

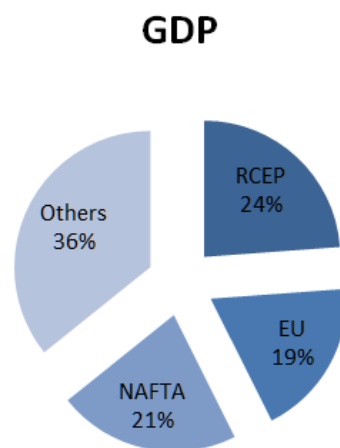


²⁴ *Ibid*

²⁵ “China to Join RCEP, Creating Massive Free Trade Area with ASEAN, India, and Japan”. (Nov 9, 2012). China Briefing. Diakses melalui <http://www.china-briefing.com/news/2012/11/09/china-to-join-rcep-creating-massive-free-trade-area-with-asean-india-and-japan.html> pada tanggal 11 April 2017

RCEP menggabungkan lima perdagangan bebas mitra ASEAN yang terdiri dari *ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA)*, *ASEAN-China FTA (ACFTA)*, *ASEAN-India FTA (AIFTA)*, *ASEAN-Republic of Korea FTA (AKFTA)* dan *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)* untuk menjadi satu yang kemudian resmi dideklarasikan pada saat KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, pada bulan November 2012.²⁶

Grafik 4.1. Perbandingan GDP RCEP dengan kerjasama regional lain tahun 2012.²⁷



RCEP beranggotakan negara – negara yang menyumbang sekitar lebih dari 20% GDP global tahun 2012.²⁸ Selain itu, melalui grafik 4.1. menunjukkan GDP RCEP menjadi salah satu perjanjian yang terbesar bila dibandingkan dengan kerjasama perjanjian lainnya di dunia. Dalam keanggotaanya, untuk saat ini RCEP tidak

²⁶ Xiao Yifei. (2015). “Competitive Mega-Regional Trade Agreements: Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) vs. Trans-Pacific Partnership (TPP)”. University of Pennsylvania Scholarly Commons. p. 22

²⁷ IMF. (October 2013). “RCEP GDP – 2012”. IMF - World Economic Outlook Databases

²⁸ Ministry of Trade and Industry Singapore. (2012) “Press Release Factsheet on The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)”. p. 1

menerima anggota baru hingga selesainya perundingan RCEP. Keenam belas negara anggota meluncurkan perundingan RCEP pada Mei 2013, dengan mengusulkan tanggal penyelesaian negosiasi pada akhir 2015 dan terus berlanjut di tahun berikutnya bila belum mendapatkan titik temu. Putaran pertama dilaksanakan pada tanggal 9 – 13 Mei 2013 di Brunei Darussalam dan terus melaksanakan berbagai putaran. Hingga saat ini, putaran RCEP telah dilaksanakan sebanyak 16 kali serta masih dalam tahap negosiasi dan pengembangan.

RCEP memiliki agenda – agenda yang berupa negosiasi perdagangan barang dan jasa, investasi, kerjasama ekonomi dan teknis, penyelesaian sengketa, dan lain – lain. Secara spesifik, RCEP berusaha melaksanakan beberapa agenda yang dibagi menjadi beberapa poin. *Pertama*, mengurangi hambatan tarif dengan bertahap dan bebas pajak pada sebagian besar perdagangan komoditi untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas. Besar penghapusan tarifnya yakni dari 90% hingga 95%. *Kedua*, menghapuskan pembatasan dan tindak diskriminatif atas perdagangan jasa untuk semua sektor. *Ketiga*, meningkatkan investasi. *Keempat*, memberikan kebutuhan khusus bagi negara – negara ASEAN yang masih negara berkembang dengan memberikan penghapusan pajak pada produk yang mereka minati. *Kelima*, menyelesaikan sengketa perdagangan dengan cara yang efektif.²⁹ Adapun manfaat RCEP, yakni dapat membantu meregionalisasi rantai penyedia fasilitas untuk perdagangan global sehingga membuat Asia sebagai pabrik dunia, mempromosikan arus investasi yang lebih mudah serta transfer teknologi, mengurangi tumpang

²⁹ Yoshifumi Fukunaga and Arata Kuno. (2012). “Toward a Consolidated Preferential Tariff Structure in East Asia: Going beyond ASEAN+ 1 FTAs”. ERIA Policy Brief

tindih antara FTA di Asia-Pasifik, membantu mengurangi sentimen proteksionis dalam ekonomi global,³⁰ serta mengurangi hambatan perdagangan dan akan membuat impor pangan dan barang konsumsi yang lebih murah juga bermanfaat bagi rumah tangga yang berpendapatan rendah.³¹

Dari sudut pandang China, RCEP adalah RTA yang menguntungkan karena menawarkan akses terhadap pasar Jepang, India dan Australia yang mana hal tersebut sangat bermanfaat mengingat upaya pembangunan kerjasama dengan tiga negara tersebut belum berhasil. Selain itu, bergabung dengan RCEP sangat baik bagi China karena mengecualikan AS yang tidak ada di dalamnya, maka China dapat menghindari ancaman AS lewat perjanjian TPP di kawasan Asia Tenggara.³² Jika RCEP berhasil disepakati, maka kawasan perdagangan bebas yang besar akan tercipta tanpa Amerika Serikat sebagai bagian darinya.

Seiring dengan perkembangannya positifnya, pada tahun 2012, penggabungan RCEP menyumbang 28,4% (US\$ 10,5 triliun) dari perdagangan dunia, posisi tersebut diduduki setelah APEC di 48,5% (US\$ 17,1 triliun) dan UE 33% (US\$ 11,7 triliun). Sedangkan 12 TPP hanya menyumbang 26% (US\$ 9,5 triliun).³³ Selanjutnya, negara anggota RCEP pada tahun 2015 turut menyumbang populasi sebanyak 3,4 miliar orang dengan GDP US\$ 21,4 triliun, atau senilai 30% dari GDP dunia. Namun, RCEP masih menghadapi banyak tantangan yang perlu untuk

³⁰ “UNCTAD Programme on Non-Tariff Measures in World Trade”. Diakses melalui <http://www.unctad.info/en/Trade-Analysis-Branch/Key-Areas/NTM/> pada tanggal 11 April 2017

³¹ Ganeshan Wignaraja. (2014). “Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP): An initial assessment”. Asian Development Bank Institute

³² Xiao Yifei. Op. Cit., p. 50

³³ Stefani Ribka and Linda Yulisman. (Dec 7, 2016). “RCEP talks speed up amid TPP failure”. Diakses melalui <http://www.thejakartapost.com/news/2016/12/07/rcep-talks-speed-up-amid-tpp-failure.html> pada tanggal 11 April 2017

diselesaikan karena adanya perbedaan kepentingan di antara negara – negara pada berbagai bidang, hal itu masih bertumpang tindih dan mencerminkan proses negosiasi yang masih belum selesai, sama juga dengan yang dialami TPP saat ini. Pertanyaan tentang kapan dan bagaimana RCEP akan terlaksana adalah hal yang sedikit rumit.³⁴

Beranjak dari proses negosiasi yang belum terselesaikan, lahirnya RCEP diyakini mampu menjadi pasar perdagangan bebas atau RTA terbesar dunia di masa depan. Selain itu, RCEP juga akan menjadi batu loncatan dari RTA atau semacam perdagangan bebas lainnya di Asia Tenggara dan bahkan di Asia-Pasifik pada tahun 2020. Hal ini didasari atas argumentasi bahwa ASEAN merupakan pusat dari pertumbuhan ekonomi dunia ditengah – tengah krisis ekonomi global. RCEP juga mengakui “*ASEAN Centrality*” yang artinya memberikan kesempatan bagi ASEAN untuk menjadi penggerak dalam kerangka RCEP.

Melihat terjadinya pertumbuhan berkelanjutan yang semakin pesat di masa depan, keseluruhan GDP RCEP secara potensial akan tumbuh lebih dari US\$ 100 triliun pada tahun 2050, atau sekitar dua kali lipat ukuran proyek ekonomi agregat TPP.³⁵ Perjanjian ini sendiri dijadwalkan akan terealisasi pada akhir tahun 2017, dan bila terealisasi akan sangat memberi keuntungan amat besar terutama China

³⁴ ASEAN. (2013). “RCEP Joint Statement of the First Meeting of the Trade Negotiating Committee”. Diakses melalui <http://www.asean.org/news/asean-statement-communications/item/regional-comprehensiveeconomicpartnership-rcep-joint-statement-the-first-meeting-of-trade-negotiating-committee> pada tanggal 11 April 2017

³⁵ “Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Issues and Way Forward”. (July 30, 2013). Diakses melalui <http://thediplomat.com/2013/07/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep-issues-and-way-forward/> pada tanggal 11 April 2017

sebagai negara *superpower* yang berpengaruh paling besar di dalamnya mengingat AS tidak tergabung dalam perjanjian ini.³⁶

3. Analisis Rivalitas antara TPP (AS) dan RCEP (RRC)

Bergabungnya Amerika Serikat maupun Republik Rakyat China di dalam kerjasama perdagangan regional di Asia Tenggara, yakni *Trans-Pacific Partnership (TPP)* dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, dilihat penulis sebagai sesuatu yang kentara dalam upaya mereka melaksanakan perimbangan kekuatan di kawasan selain demi kepentingan ekonomi. Ekonomi memang tidak dapat terlepas dengan unsur politik dalam kepentingan suatu negara bila berhubungan internasional, hal ini dapat dilambangkan seperti uang koin yang memiliki dua sisi berbeda namun terikat dalam satu, begitu juga sama halnya dengan hubungan internasional dewasa ini. Perlu ditekankan juga bahwa pemaksaan *power* dan hegemoni pada masa kini sudah jauh berbeda bila dibandingkan dengan yang terjadi pada masa lampau. Perluasan pengaruh maupun kekuasaan sudah lebih halus dan melalui aspek – aspek vital, seperti ekonomi, bukan hanya politik dan keamanan.

Berkaitan dengan *power*, China telah jelas semakin melebarkan sayapnya ke negara – negara tetangga khususnya Asia Tenggara seiring menguatnya kondisi China yang merangkak menuju negara *superpower* di Asia. Menyadari akan realitas

³⁶ Nyshka Chandran. (Jan 12, 2017). “China-backed trade deal may not gain from TPP's loss. Blame India”. CNBC. Diakses melalui <http://www.cnbc.com/2017/01/12/trumps-win-puts-tpp-in-danger-but-china-backed-trade-deal-may-not-gain-because-of-india.html> pada tanggal 11 April 2017

itu, AS kemudian bergabung dengan TPP tidak hanya demi alasan *rebalancing* untuk menguatkan pengaruhnya di Asia Tenggara, namun juga demi membendung pengaruh China di kawasan. Dari sisi China, bergabungnya AS ke dalam TPP disadari olehnya sebagai respon AS terhadap eksistensinya di kawasan ini. Ditambah lagi, bila dilihat dari tinjauan sejarah hubungan internasional yakni ketika AS melakukan kerjasama dagang dengan negara lain, faktor pendorong AS tidak hanya kepentingan ekonomi, namun juga adanya kepentingan politik. Misalnya yakni sekitar tahun 2000, perjanjian perdagangan AS dengan negara – negara Timur Tengah yakni Bahrain, Maroko, dan Oman tidak semata berdasarkan pada kepentingan ekonomi saja, namun juga tujuan keamanan untuk memerangi terorisme.³⁷ Contoh lain misalnya Amerika Serikat melakukan kerjasama dengan negara di kawasan lain yakni Jepang dan Korea Selatan, hal itu untuk mempertahankan kehadiran AS di Asia Timur sebagai penyeimbang *power* Korea Utara.

Merespon bergabungnya AS ke TPP, kemudian China bergabung dengan RCEP sebagai tandingannya. Penulis menilai bahwa persepsi mengenai merosotnya pamor dan pengaruh AS sebagai negara adidaya di tataran global karena permasalahan ekonomi dalam negeri telah sedikit banyak ikut mendorong Negeri Tirai Bambu ini unjuk gigi di kawasan. Stabilitas hubungan dengan negara – negara tetangga sebagai politik luar negerinya menjadikan Asia Tenggara sebagai prioritas yang harus tetap dikokohkan karena gejolak yang terjadi di kawasan akan

³⁷ “Organisasi dan Perjanjian Perdagangan Bebas”. Magister Negara Muslim. Diakses melalui <http://id.reingex.com/Master-Business-Islamic-FTA.htm> pada tanggal 11 April 2017

berimplikasi langsung terhadap kondisi dalam negeri China.³⁸ Tujuan akhir dari diplomasi yang dilakukan oleh China ini adalah tentunya untuk dapat mengurangi pengaruh Amerika Serikat di Asia Tenggara hingga mereka beralih ke China.

Baik Amerika Serikat maupun China memang membantah saling berseteru, namun dapat diketahui bahwa memang kedua negara bersaing melalui TPP dan RCEP. Apalagi kesan dari Amerika Serikat yang bersikap terhadap China yang hanya bisa bergabung jika memenuhi standar TPP. Sedangkan China lebih memilih merealisasikan RCEP.³⁹ Penulis menilai persaingan di antara keduanya sejalan dengan “perang tertutup” dengan asas “persaingan damai” tanpa menghadapkan kedua kubu secara langsung untuk bersitegang.

Berkaitan dengan regionalisme ekonomi, TPP maupun RCEP adalah suatu bentuk yang merupakan jenis “regionalisme baru” dimana mengedepankan aspek ekonomi dan dilaksanakan bersama lebih dari satu kawasan yang sama, dimana masing – masing kebijakan termasuk bentuk dari *Preferential Trade Agreement (PTA)* atau lebih dikenal *Regional Trade Agreement (RTA)* yang memberlakukan peraturan khusus untuk negara – negara anggota saja dan tidak memberlakukannya dengan negara – negara di luar anggotanya.

Meninjau keterkaitan kepentingan AS maupun RCEP dalam regionalisme ekonomi, keduanya melaksanakan kerjasama dengan alasan sebagai upaya persaingan kekuasaan serta untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Hal itu

³⁸ N.R. Yuliantoro. (2012). “Menuju Kekuatan Utama Dunia”. Institute of International Studies, Yogyakarta. hal. 106

³⁹ “TPP Versus RCEP Ujian Berat Soliditas Ekonomi ASEAN”. Diakses melalui <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/15/10/19/nwgmcl18-tpp-versus-rcep-ujian-berat-soliditas-ekonomi-asean> pada tanggal 12 April 2017

sejalan dengan perspektif dalam konsep regionalisme ekonomi bahwa organisasi regional dilihat dari kacamata politis sebagai upaya untuk membentuk aliansi bersama untuk merespon tantangan eksternal, seperti ancaman yang mempengaruhi kekuasaan. Hegemoni menjadi penting dalam upaya mewujudkan kepentingan nasional.⁴⁰ Maka, bergabungnya negara *superpower* dalam kerjasama ekonomi kawasan atau regionalisme disinyalir karena ada pertimbangan selain ekonomi, yakni *power*.

Dihubungkan keterkaitannya dengan konsep *power*, AS dan China mendefinisikan *power* sesuai dengan identitas dan kepentingannya yang memadukan antara *soft* dan *hard power* menjadi karakteristik yang diterapkan melalui TPP dan RCEP. Keduanya mampu menunjukkan diri sebagai negara *superpower* yang memiliki daya tarik yang cukup besar dengan kebijakan – kebijakan yang mengedepankan kerjasama dan pembangunan kawasan seperti kerjasama regional tersebut. Dengan memanfaatkan kekuatan negara, mereka melakukan pendekatan di kawasan Asia Tenggara dengan tawaran untuk bekerjasama yang akan memberikan iming – iming keuntungan menggiurkan bagi para negara – negara di Asia Tenggara. Kebijakan itu dilakukan AS dan China bukan hanya sebagai salah satu alat untuk merealisasikan kepentingan nasional dan demi mendapatkan keuntungan ekonomi, namun agar mampu memperkuat pengaruh dan *powernya* di kawasan sebagai sarana bertanding atau rivalitas kekuatan antara kedua kubu. Keduanya, sebagai negara *superpower* saling

⁴⁰ Louise Fawcett and Andrew Hurrell. (2002). “Regionalism in World Politics”. Oxford University Press. p. 7-36

memperbesar dan memperluas *power* mereka ke kawasan agar mampu menjadi negara yang paling kuat di antara yang kuat.

Bagi negara yang ingin meningkatkan pengaruhnya, membentuk suatu forum kerjasama adalah hal yang lumrah di masa kini, apalagi bila negara tersebut ingin menjadi yang paling kuat maupun ingin mendominasi negara – negara anggota yang tergabung di dalamnya. Tak dapat dipungkiri dalam melihat kondisi ekonomi global sekarang, aura persaingan antara AS dan RRC sangat terasa. Masing – masing negara adidaya ini menjadi rivalitas sebagai “*influence exercise*” di kawasan Asia Tenggara. Kedua bentuk regionalisme ekonomi baik TPP maupun RCEP ini adalah sebagai instrumen politik luar negeri masing – masing negara. AS dengan kebijakan ‘Pivot to Asia’ yang ingin menyeimbangkan lagi hubungannya dengan Asia karena pengalaman masa lalunya yang cenderung terkesan melupakan Asia karena lebih fokus ke kawasan Timur Tengah atas asas ‘War on Terror’. Sedangkan bagi China, kerjasama ini sejalan dengan politik luar negerinya yang berasaskan ‘Asia First’ atau “berhubungan baik dengan tetangga” yang mengacu pada strategi ini, China merasa diharuskan agar memfokuskan politik luar negerinya pada negara tetangga dan wilayah pengaruh terdekatnya.

Presiden Obama pada masa pemerintahannya saat baru terpilih membuat Asia-Pasifik menjadi fokus politik luar negeri yang baru, khususnya Asia Tenggara. AS sadar betul akan potensi di Asia Tenggara sebagai mesin penggerak ekonomi dunia baik dalam investasi maupun perdagangan di masa mendatang. Penguatan TPP melalui hadirnya AS memang bukanlah hanya sebagai upaya dalam meraup keuntungan ekonomi, memperbaiki keadaan ekonomi, dan menciptakan lapangan

pekerjaan bagi warga AS saja, tetapi lebih lagi daripada itu. TPP merupakan suatu senjata yang dimainkan AS untuk penguatan dominasi seiring majunya tataran perekonomian global di tengah kebangkitan dan kemajuan China. Penulis juga menemukan adanya bukti yang menguatkan kebijakan perlawanan AS yang menyindir China melalui pernyataan Presiden Obama, yakni: *“If we don’t write the rules for trade around the world, guesst what? China will.”*⁴¹

Presiden RRC juga yaitu Presiden Xi Jinping turut berambisi menjadikan negaranya sebagai pemimpin dunia dengan melancarkan perluasan perdagangan, memberikan bantuan global, investasi, dan sebagainya. China telah mampu meyakinkan dunia bahwa dia dapat menjadi rekan kerjasama yang menguntungkan Asia Tenggara terlepas dari pandangan kawasan ini yang khawatir bahwa pendekatan China terhadapnya akan memberikan dampak buruk mengingat China sangat keras dalam perluasan pengaruh komunisme pada masa lalu, China juga memiliki pengalaman hubungan tidak baik dengan tetangga maupun kawasan Asia Tenggara berkaitan masalah klaim wilayah. Kini China mampu memukau Asia Tenggara dengan memperkuat perdagangan dan hubungan finansial dengan negara – negara di kawasan ini.

Penulis pahami pembentukan forum kerjasama TPP maupun RCEP yakni sebagai usaha selaku negara dominan untuk menciptakan suatu wadah dimana ia dapat memainkan dan menerapkan pengaruhnya. Istilah yang disebut dengan “kompetisi damai” lebih cocok dalam menjelaskan hubungan keduanya. Penting

⁴¹ Schuman Michael. (May 15, 2015). Bloomberg Businessweek “US-China Rivalry, Whose Money Are We Going to Follow”. Diakses melalui <http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-14/us-china-rivalry-whose-money-will-the-world-follow-> pada tanggal 12 April 2017

juga untuk dipahami bukan hanya mengenai siapa sajakah yang tergabung di dalamnya dan bagaimana kerjasama ini dilaksanakan namun siapakah juga yang tidak tergabung di dalamnya. Strategi China dalam penguatan kerjasama perdagangan ekonomi regional dan investasi melalui RCEP ini tidak mengikutsertakan Amerika Serikat, begitu juga sebaliknya TPP tidak mengikutsertakan China di dalamnya.

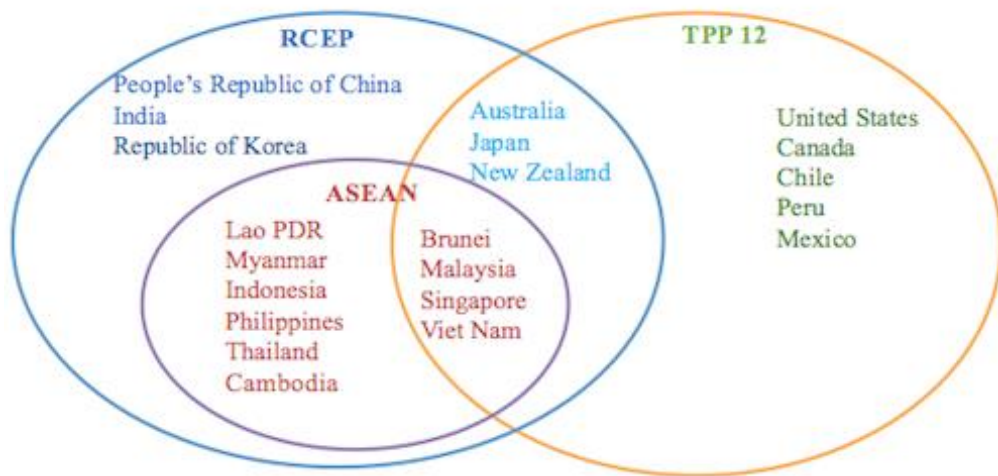
Singkatnya, bagi negara yang relatif kuat seperti keduanya, bentuk regionalisme ekonomi seperti TPP maupun RCEP merupakan kesempatan untuk menjalankan strategi, meraup keuntungan negara, tempat untuk mewedahi hegemoni, dan tempat untuk melegitimasi *power* mereka. China melakukan regionalisme demi memperbesar pengaruh mereka, memperluas aliansi, serta keuntungan ekonomi. Begitu juga sama halnya AS hadir di kawasan ini, namun hadirnya AS juga untuk bersaing dengan China demi upaya *balancing* di kawasan. Hingga saat ini kedua perjanjian kerjasama tersebut baik TPP maupun RCEP masih dalam proses negosiasi dan belum sepenuhnya terealisasi. Keberhasilan masing – masing kepentingan AS maupun China akan bisa dicapai tergantung sejauh mana kedua perjanjian diimplementasikan.

B. Implikasi Rivalitas Ekonomi AS – RRC di Asia Tenggara

Dewasa ini, Amerika Serikat dan Republik Rakyat China telah menggeserkan kepentingannya dari kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah, ke kawasan Asia-Pasifik yang artinya membuat kawasan ini bertransformasi menjadi “medan perang” baru bagi kepentingan – kepentingan negara adikuasa. Asia Tenggara

sebagai bagian dari Asia-Pasifik tentunya otomatis juga akan menjadi sasaran baru bagi ajang rivalitas ini yang tentunya akan berimplikasi atau berdampak langsung terhadap kawasannya. Posisi negara – negara di Asia Tenggara antara rivalitas Amerika Serikat dan Republik Rakyat China menjadi penting namun menjadi dilema dengan adanya kerjasama ekonomi yang keduanya lancarkan di Asia Tenggara. Saat ini negara – negara Asia Tenggara dalam ASEAN memasuki dua perundingan multilateral dalam lingkup Asia-Pasifik baik itu *Trans-Pacific Partnership (TPP)* dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*.

Gambar 4.3. Keanggotaan negara – negara ASEAN di antara TPP dan RCEP.



Penulis melihat bahwa negara – negara ASEAN bisa dikatakan masih tidak memihak siapapun sepenuhnya. Hal itu dapat ditunjukkan atas ASEAN sendiri yang cenderung terbuka terhadap kedua kubu dengan bergabungnya negara – negara di

kawasan ini ke dalam TPP maupun RCEP. Keanggotaannya dapat digambarkan dalam gambar 4.3.⁴²

Pandangan senada dilontarkan oleh Chien Peng Chung yang menilai bahwa ASEAN terkesan menerapkan suatu bentuk “tidak memihak” atau *hedging* dalam menyikapi hubungan antara AS dan RRC.⁴³ Saat ini empat anggota ASEAN bergabung dalam TPP, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Sedangkan seluruh negara – negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN masuk ke dalam RCEP, namun tidak dipastikan juga bahwa ASEAN lebih mendukung RCEP dan membuatnya mampu mengalahkan TPP, semua itu tergantung bagaimana kedua perjanjian ini terlaksana. Dari hal ini pula, penulis memandang bahwa terbaginya negara – negara ASEAN di antara TPP maupun RCEP akan berdampak pada menurunnya kohesifitas mereka dalam “Sentralitas ASEAN (*ASEAN Centrality*)”, yakni kesatuan antar anggota ASEAN bisa saja menjadi terpolarisasi dan tidak dapat berfungsi baik karena terbaginya ASEAN ke dalam dua kerjasama dari kedua kubu yang berbeda.

Dalam situasi tersebut, posisi yang tak kalah penting selain dari AS dan China memang ditempati sepuluh negara ASEAN. Memang, baik TPP maupun RCEP memberikan perhatiannya pada perekonomian ASEAN. Namun di sisi lain, tidak semua anggota ASEAN bergabung dalam TPP. *Asian Development Bank (ADB)*

⁴² Jingyang Chen. (Sep 9, 2015) “TPP and RCEP: Boon or Bane for ASEAN?”. Diakses melalui <http://asiafoundation.org/2015/09/09/tpp-and-rcep-boon-or-bane-for-asean/> pada tanggal 12 April 2017

⁴³ Chien Peng Chung. (2004). “Southeast Asia-China Relations: Dialectics of Hedging and Counter Hedging”. Southeast Asian Affairs 2004. Singapura: ISEAS. p. 37

juga tidak memprediksikan bahwa ASEAN akan terbelah dua menjadi menjadi pro-TPP dan pro-RCEP, namun dengan adanya keanggotaan ganda sejumlah negara ASEAN, sangat mungkin mempengaruhi solidaritas ASEAN.⁴⁴

Beranjak dari hal itu, penulis terlebih dahulu akan melakukan perbandingan keduanya dari segi manfaat yang akan berpengaruh pada ASEAN. TPP merupakan perjanjian dagang regional yang menerapkan standar tertinggi dalam hubungan perdagangan bebas di antara anggotanya yakni penetapan yang tidak hanya mengatur tentang aspek ekonomi, namun juga turut mengatur masalah sosial maupun lingkungan. Bila ada anggota yang menyalahi kesepakatan tersebut, maka mereka dapat dikenai sanksi ekonomi.⁴⁵ Ciri khas lain di TPP yakni gugatan yang dapat dilayangkan ke sebuah negara oleh sebuah perusahaan. Hal itu dapat terjadi bilamana sebuah negara diduga melanggar perjanjian di dalamnya, mekanisme ini diatur dalam prinsip *Investor-State Dispute Settlement (ISDS)*. Mekanisme ini jelas sangat berbeda dengan yang ada sebelumnya di dalam WTO maupun kerjasama lainnya, dimana dalam perdagangan bebas gugatan hanya dapat di atas namakan negara terhadap negara lain, bukan atas nama perusahaan. Selain itu, TPP juga turut melibatkan isu pertanian yang cenderung sensitif untuk diliberalisasikan.

⁴⁴ “TPP Versus RCEP Ujian Berat Soliditas Ekonomi ASEAN”. Diakses melalui <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/15/10/19/nwgmcl18-tpp-versus-rcep-ujian-berat-soliditas-ekonomi-asean> pada tanggal 12 April 2017

⁴⁵ Dinna Wisnu. (May 18, 2016) “Apa Kabar TPP dan RCEP?”. Diakses melalui <http://koran-sindo.com/news.php?r=0&n=2&date=2016-05-18?r=0&n=2&date=2016-05-18> pada tanggal 12 April 2017

Hal – hal yang telah disebutkan yakni isu pertanian dan hak kekayaan intelektual (haki) menghadapi suatu rintangan sehingga mengakibatkan TPP memiliki persoalan. Meski demikian, sejumlah pengamat menyebut TPP lebih berkualitas karena meliberalisasi hal yang berbeda dan belum pernah direalisasikan, memang sektor – sektor tersebut dianggap isu sensitif, tetapi jika kesepakatan terlaksana maka akan menjadi langgeng dan menguntungkan. Sebenarnya masalah dalam sektor – sektor tersebut pula yang turut menghambat perundingan Putaran Doha dalam WTO karena negara – negara anggota cenderung menghindari tuntutan soal hak kekayaan intelektual serta memproteksi sektor pertanian.

Jingyang Chen, tokoh *Economic Development Program, Asia Foundation*, menguatkan pandangan senada bahwa belum bergabungnya enam negara ASEAN dalam TPP yakni lantaran standar tinggi terutama soal hak kekayaan intelektual atau hak paten dan sektor pertanian. Absennya keenam negara ASEAN dalam TPP itulah yang bisa menjadi ancaman integrasi ekonomi ASEAN. Contohnya dalam isu hak paten, tingginya tuntutan dan regulasi hak paten dalam TPP bukan hanya menjadi beban bagi empat negara ASEAN anggota TPP, tapi juga berimbas pada enam negara ASEAN lain.⁴⁶

Empat negara ASEAN yang bergabung dalam TPP bisa menikmati manfaat besar, sedangkan tidak sama halnya bagi negara ASEAN yang belum bergabung. Contohnya Thailand dan Filipina, TPP tidak akan memberikan banyak manfaat atau bahkan mungkin saja justru merugikan. Pasalnya, negara yang selama ini menjadi

⁴⁶ Jingyang Chen. Loc.Cit.

mitra dagang kedua negara tersebut yaitu Amerika Serikat dan Jepang, dikhawatirkan mereka akan beralih ke Malaysia dan Brunei Darussalam lantaran tarif perdagangan yang lebih menjanjikan dalam keanggotaan mereka di TPP. TPP juga akan berimbas pada sektor maupun industri tertentu dalam ASEAN. Misalnya yakni industri elektronik. Vietnam dan Singapura bisa menikmati manfaat jaringan suplai barang elektronik sesuai kesepakatan TPP. Tapi bagi negara ASEAN yang tidak tergabung justru berdampak sebaliknya. Hal itu contohnya memungkinkan pertumbuhan industri elektronik di Laos dan Kamboja melambat lantaran perusahaan – perusahaan dari Amerika Serikat dan Jepang mengalihkan pabriknya ke negara anggota TPP lainnya. Penulis memandang dampak – dampak tersebut akan menimbulkan kecemburuan yang nantinya akan merusak hubungan sesama ASEAN. Bukan mustahil pula isu ini justru menimbulkan kesenjangan di kalangan anggota ASEAN.⁴⁷

Sementara itu, standar tinggi yang telah disebutkan dalam TPP tidak ada di dalam RCEP. RCEP lebih mengedepankan kondisi dari masing – masing negara sebelum mampu untuk meliberalisasikan perdagangan antar negara anggotanya. RCEP lebih memikirkan kesepakatan tunggal mengenai perdagangan produk, baru setelahnya melakukan penurunan bea atau pajak masuk. Kesepakatan ini juga jauh dari keterkaitan hambatan non-tarif. RCEP juga memiliki cakupan geografis lebih terbatas dibandingkan dengan TPP yang sangat luas, RCEP juga tidak memasuki sektor – sektor sensitif seperti pertanian dan hak kekayaan intelektual (haki). Oleh karena itu, RCEP dipandang lebih realistis sehingga lebih besar kemungkinannya

⁴⁷ *Ibid*

untuk berjalan bagi ASEAN. Tetapi, rendahnya tingkat kesepakatan tersebut mengakibatkan rendahnya pula keuntungan yang nanti didapatkan anggotanya.

Dalam menanggapi kedua perjanjian, ASEAN tentu akan mengalami kesulitan dalam memainkan peran dan pengaruhnya sebagai sebuah komunitas ekonomi yang ada di dalam TPP. Karena itu pula, ASEAN diprediksikan akan lebih berkehendak pada terealisasinya RCEP dimana ASEAN bisa hadir secara utuh sebagai sebuah ekonomi yang terintegrasi karena menggunakan kerangka ASEAN sebagai dasar pembentukannya, maka dengan begitu ASEAN bisa berharap RCEP mampu meningkatkan integrasi dan kerjasama ekonomi antar anggotanya. Namun masalahnya, merealisasikan manfaat RCEP bagi ASEAN juga tidaklah mudah. Pasalnya, perselisihan beberapa negara ASEAN dengan China selaku negara yang memainkan peranan kuat di RCEP justru sempat mengalami pertikaian dalam perebutan klaim wilayah Laut Cina Selatan yang belum terselesaikan hingga kini.⁴⁸

Dampak yang diberikan oleh TPP dan RCEP terhadap ASEAN akan sangat bergantung pada ASEAN sebagai sebuah kesatuan, semuanya bersandar pada kualitas negosiasi negara – negara sesama anggota. Soal TPP, ASEAN perlu bersuara keras terkait transparansi kesepakatan TPP dengan melakukan keterlibatan seluruh negara ASEAN, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Hal itu demi memudahkan pencapaian integrasi ekonomi ASEAN sekaligus meminimalkan kesenjangan yang ada. Sedangkan soal RCEP, ASEAN perlu untuk lebih fokus pada kepentingan bersama sebagai sesama anggota dalam satu kesatuan.

⁴⁸ Jingyang Chen. Loc.Cit.

ASEAN juga diharapkan mampu memainkan peran aktif sebagai penengah di antara dua kesepakatan perdagangan besar itu, yakni memfasilitasi TPP dan RCEP sekaligus membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi Asia-Pasifik. Solidaritas ASEAN tidak seharusnya terganggu meski kini sedang menghadapi dilema di antara perang pengaruh raksasa ekonomi dunia dalam TPP dan RCEP.⁴⁹

Berkaitan dengan dampak pada sektor ekonomi dalam ASEAN yaitu *ASEAN Economic Community* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), jika suatu saat TPP maupun RCEP disepakati, akan terjadi suatu implikasi yang kurang menguntungkan bagi ASEAN, yakni banjirnya produk impor ke negara – negara ASEAN yang tentunya akan semakin besar karena beberapa negara anggota dapat menjadi pintu masuk terhadap berbagai produk yang berasal dari negara – negara mitra dua kesepakatan perdagangan itu khususnya AS dan China. Masalah ini muncul juga karena MEA menyepakati peningkatan akses pasar di dalam anggota ASEAN. Dampak negatif tersebut jelas akan berimbas terhadap industri produk konsumsi dan sejenisnya di dalam negeri.

Setelah keanggotaan ASEAN baik di TPP maupun RCEP, Asia Tenggara akan berperan sebagai kawasan konsumen bagi produk AS – China maupun negara lainnya yang dibandrol dengan harga yang lebih murah ketimbang produk lokal. Dikhawatirkan, hal itu akan menimbulkan kerugian besar di dalam negeri karena produknya kalah bersaing yang kemudian menimbulkan turunnya penghasilan rakyat dan bahkan mengakibatkan pengangguran besar – besaran, sehingga keadaan

⁴⁹ Deardorff Alan V. (2013) “Trade Implications of the Trans-Pacific Partnership for ASEAN and Other Asian Countries”. The University of Michigan. p. 1

ekonomi negara semakin terpuruk. Jika produk – produk dalam negeri tidak kompetitif, negara itu hanya akan jadi pasar bagi produk – produk negara lain. Negara – negara berkembang di Asia Tenggara dalam ASEAN bisa saja tidak memilih TPP karena alasan melindungi sektor haki, pertanian dan kepentingan domestik lain. Namun, apabila TPP terwujud di masa mendatang, negara tersebut hanya akan menjadi penonton yang menyedihkan dari bentuk baru perdagangan di Asia-Pasifik. Strategi yang bisa dilakukan adalah membuat akses ke TPP sambil melihat untung ruginya. Perlu juga dikaji bagaimana yang dirasakan empat negara ASEAN peserta TPP selama bergabung.⁵⁰

Beberapa negara ASEAN yang sudah berpartisipasi di kedua negosiasi atau memiliki keanggotaan ganda, yakni Brunei, Malaysia, Singapura dan Vietnam. Memang, dalam menanggapi kedua perjanjian, ide keanggotaan ganda adalah hal yang menarik karena dapat merasakan manfaat dari masing – masing skema. Namun, TPP dan RCEP menawarkan dominasi saling berlawanan, yang satu berfokus pada integrasi mendalam dengan Amerika, dan yang satunya dengan China. Negara yang terlibat dalam negosiasi ganda diharuskan menyelaraskan ketentuan mereka dalam rangka penyesuaian kebijakan internal mereka agar menyatu dengan persyaratan dari kedua skema. Tetap saja, tumpang tindih yang ditimbulkan akan membuatnya lebih rumit, apalagi kedua skema memiliki aturan yang berbeda – beda, negara yang beranggotakan ganda ini perlu lebih ekstra

⁵⁰ “Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership guna Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan ASEAN dalam rangka Ketahanan Regional”. (November 2013). Jurnal Kajian Lemhanas RI. Edisi 16. hal. 65

bertindak dan memutar ide dalam mengatur kebijakan agar meminimalisir kerugian yang kemungkinan timbul.

Mengenai kohesifitas ASEAN atau keinginan kuat negara – negara anggota untuk bertahan dalam satu insititusi atau terhadap ASEAN sebenarnya sudah dialami. Hal ini telah sering terjadi pada masalah non ekonomi, yakni dalam masalah perbatasan wilayah yang terus berlangsung. Ada beberapa konflik perebutan wilayah yang terjadi antar negara anggota ASEAN, misalnya saja konflik perebutan wilayah antara Filipina dan Malaysia, Konflik Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia, dan Konflik antara Thailand dan Kamboja.⁵¹

Konflik yang terjadi antara sesama negara ASEAN ini tidak sampai menjadi konflik terbuka. Masing – masing kedua negara biasanya berusaha meredam konflik yang terjadi agar tidak merusak hubungan diplomasi antar keduanya. Namun, kasus ini kemudian belum terselesaikan sehingga rata – rata dibawa ke Mahkamah Internasional dan tidak pada kerangka ASEAN. ASEAN masih kurang dipercayai oleh negara anggotanya untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Berkaitan peranan ASEAN dalam penyelesaian konflik, sebenarnya telah dilaksanakan pada 1976 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama ASEAN di Bali dan menghasilkan ‘Bali Concord I’ dengan berbagai prinsip kerjasama salah satunya yaitu mengenai penyelesaian konflik atau sengketa antar negara anggota ASEAN, yaitu dibentuknya *Treaty of Amity and Cooperation (TAC) in Southeast Asia*. Terdapat 3 (tiga) mekanisme atau prosedur penyelesaian konflik atau

⁵¹ Bambang Cipto. (2007). “Hubungan Internasional di Asia Tenggara”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

sengketa. *Pertama*, penghindaran timbulnya konflik atau sengketa dan penyelesaian melalui negosiasi secara langsung. *Kedua*, penyelesaian konflik atau sengketa melalui *the High Council ASEAN*. *Ketiga*, penyelesaian konflik atau sengketa melalui Mahkamah Internasional.⁵²

Apabila dilihat dari kenyataannya, seringkali mekanisme pertama dan yang kedua tidak terwujud, sehingga yang dipakai yaitu mekanisme yang ketiga. Padahal seharusnya mekanisme yang diterapkan adalah mekanisme yang pertama dan yang kedua karena pada mekanisme tersebut ASEAN dan negara – negara anggotanya memiliki peran yang besar sehingga ASEAN dapat menunjukkan sentralitasnya. Maka timbul anggapan bahwa ASEAN gagal dan tidak mampu dalam menyelesaikan konflik dan hal ini dapat mengganggu perkembangan dari ASEAN itu sendiri sehingga menurunkan kohesifitas dalam ASEAN sendiri.

Ada faktor penyebab ketidakmampuan ASEAN dalam menyelesaikan konflik antar anggota yaitu diadopsinya prinsip *Non-Interference ASEAN (ASEAN Way)* yakni prinsip tidak mencampuri urusan negara lain. Alasan untuk mengaplikasikan norma non intervensi sesungguhnya kurang komprehensif dan kurang tanggap menjawab permasalahan bila dikaitkan dengan perkembangan lingkungan internasional saat ini. Karena dalam menyelesaikan konflik, intervensi pasti selalu terjadi dan seharusnya intervensi ASEAN harus lebih kuat. Apabila penyelesaian konflik hanya sekedar mediasi dan himbuan maka konflik tersebut sulit untuk diselesaikan karena tidak hanya dibutuhkan kesadaran dan tindakan penuh dari

⁵² Huala Adolf. (2004). “Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional”. Jakarta: Sinar Grafika

pihak yang berkonflik saja, namun juga ASEAN selaku pemersatu negara – negara anggota harus ikut memecahkan masalah dan tidak boleh hanya berdiam diri saja.

ASEAN selama ini belum mampu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar negara anggotanya dan masih menjadi tantangan yang selama ini masih diperbaiki oleh ASEAN. Ditambah dengan munculnya kerjasama regional dan ditempatkan di tengah persaingan dua negara di dalamnya, akan membuat hal ini menjadi ancaman baru yang menantang kohesifitas ASEAN. Perlu adanya kesadaran diri untuk menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam “Sentralitas ASEAN”, sebab bila tidak akan mengakibatkan menurunnya kohesifitas ASEAN.

Karena dua proposal perjanjian ini saling berkompetisi, maka kecil kemungkinan kedua perjanjian tersebut secara simultan memberikan keuntungan. Maka, ASEAN perlu mempertimbangkan dengan baik kesepakatan mana yang akan dipilih. RCEP akan menempatkan ASEAN sebagai pusat kesepakatan dagang karena turut dicetuskan oleh ASEAN dalam kerangkanya, sedangkan TPP cenderung meninggalkan atau tidak melibatkan kerangka ASEAN sebagai asas perjanjian. Persoalan geopolitik juga akan menempatkan ASEAN pada posisi rumit dengan melihat analisis yang menyebutkan TPP lebih dipengaruhi AS, sementara RCEP dalam pengaruh China. Di satu sisi, persaingan antara RCEP dan TPP akan membuat ASEAN lebih memiliki peran penting sebagai lembaga regional. RCEP mengakui “Sentralitas ASEAN”, meskipun ini lebih nyaman ditafsirkan oleh China untuk mengecualikan Amerika Serikat di dalamnya karena tidak memiliki satupun FTA dengan ASEAN. Di sisi lain, sentralitas ASEAN tidak akan benar – benar

terjamin dalam RCEP, di mana ia mungkin bisa dikesampingkan oleh kekuatan ekonomi yang lebih besar seperti China.

Kohesifitas ASEAN akan terpengaruh, apalagi dalam segi internalnya sendiri ASEAN masih memiliki permasalahan lama yang menjadi tantangan dalam soliditasnya. Dua proposal yang bersaing bisa membagi ASEAN, bukan tidak mungkin bahwa ASEAN akan dibagi menjadi pro-TPP dan pro-RCEP. Negara – negara ASEAN dapat terpecah ke dalam kubu yang memihak AS atau China. Apabila hal ini terjadi, ASEAN akan kembali terpolarisasi, yang akan berakibat pada marjinalisasi peran ASEAN sebagai salah satu pilar arsitektur keamanan di Asia Tenggara. Menghadapi skenario demikian, Asia Tenggara akan dihadapkan pada tantangan sulit. Jelas Asia Tenggara tak akan dan tak boleh tunduk kedua kubu, Asia Tenggara harus dipertahankan sebagai kawasan damai dan otonom, dimana masalah – masalah di kawasan ini harus diselesaikan oleh negara – negara di kawasan sendiri. Dalam konteks itu, *ASEAN Centrality* menjadi terasa sangat penting untuk direnungi oleh negara – negara Asia Tenggara dalam ASEAN. Rivalitas ekonomi dan politik antara China dan Amerika Serikat, jangan sampai membuat ASEAN terjebak di tengah arus pusaran persaingan kedua negara tersebut.

Singkatnya, rivalitas ekonomi dan politik yang saat ini tengah terjadi antara China dan Amerika Serikat harus dimanfaatkan dan diarahkan untuk keuntungan negara – negara ASEAN sebanyak mungkin, bukan untuk menyerahkan diri dan dikuasai. Jika hal itu gagal dilaksanakan, akan dipastikan perkumpulan negara – negara Asia Tenggara ini akan menemukan akhir yang tidak membahagiakan

sehingga membuatnya terus terpuruk dalam belenggu perkumpulan negara berkembang.